

## Penguatan *Civic Literacy* Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Literasi Digital

Basariah\*, Mohammad Ismail, Jumrawati, Maria Grace Putri Edi, M. Rizki Nugraha

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125. Indonesia

\*Corresponding Author: [basyariah@unram.ac.id](mailto:basyariah@unram.ac.id)

### Article History

Received : April 07<sup>th</sup>, 2026

Revised : April 27<sup>th</sup>, 2026

Accepted : May 16<sup>th</sup>, 2026

**Abstract:** Di tengah meningkatnya arus informasi digital, peserta didik dituntut tidak hanya memiliki kemampuan literasi digital, tetapi juga kecakapan kewarganegaraan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, penguatan kompetensi tersebut dapat diintegrasikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berfungsi sebagai wahana pengembangan karakter dan kewarganegaraan peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan *civic literacy* siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis literasi digital pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mataram. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta dokumentasi pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam mengevaluasi informasi digital, mengidentifikasi bias informasi, memahami isu-isu kewarganegaraan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan publik. Pembelajaran berbasis diskusi, analisis kasus, dan pemanfaatan sumber digital memberikan ruang bagi siswa untuk membangun pemahaman yang lebih kontekstual mengenai nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Namun demikian, penguatan *civic literacy* masih lebih dominan pada aspek pengetahuan dan pemahaman konseptual dibandingkan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh kompetensi guru, karakteristik siswa, budaya kelas, dan dukungan infrastruktur digital sekolah. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat *civic literacy* siswa sebagai warga negara muda di era digital.

**Keywords:** *civic literacy*; literasi digital; kewarganegaraan digital; Pendidikan Kewarganegaraan; Pendidikan Pancasila

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemudahan akses terhadap informasi melalui internet dan media sosial memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber secara cepat dan luas. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kredibilitas informasi yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan

kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan informasi digital (Hobbs, 2010; Pangrazio & Sefton-Green, 2021).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, penguatan kompetensi kewarganegaraan saat ini dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Mata pelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penguatan identitas kebangsaan, serta pengembangan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Pendidikan Pancasila pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang

bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab (*smart and good citizens*) (Branson, 1998; Winataputra, 2022). Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital.

Transformasi digital juga telah mengubah praktik kewarganegaraan dari ruang publik konvensional menuju ruang publik digital. Warga negara tidak hanya berpartisipasi melalui interaksi langsung dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang memungkinkan pertukaran informasi dan gagasan berlangsung secara cepat dan luas. Isin dan Ruppert (2020) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru kewarganegaraan yang menuntut kemampuan berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Kondisi ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang memadai agar mampu menyikapi berbagai persoalan publik secara rasional, kritis, dan etis.

Secara konseptual, literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, merefleksikan, dan mengomunikasikan informasi melalui berbagai media digital secara efektif dan bertanggung jawab (Hobbs, 2010). Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami kredibilitas informasi, mengenali bias media, melindungi privasi digital, serta menggunakan teknologi untuk tujuan yang konstruktif (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Dalam konteks pendidikan, literasi digital menjadi kompetensi esensial abad ke-21 yang memungkinkan peserta didik beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung secara cepat.

Di sisi lain, civic literacy merupakan kemampuan warga negara untuk memahami sistem politik dan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, isu-isu publik, serta kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis (Milner, 2002). Branson (1998) menjelaskan bahwa civic literacy dibangun melalui tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan). Ketiga komponen tersebut menjadi fondasi dalam

membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era digital, civic literacy tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap kehidupan politik dan sosial, tetapi juga kemampuan berpartisipasi secara cerdas dan etis dalam ruang digital (Choi, 2016).

Hubungan antara literasi digital dan civic literacy semakin relevan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan abad ke-21. Choi (2016) menjelaskan bahwa kemampuan literasi digital berkontribusi terhadap pembentukan *digital citizenship*, yaitu kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Sejalan dengan itu, Volcic dan McMahon (2025) menegaskan bahwa penguatan civic literacy tidak dapat dilepaskan dari literasi digital karena partisipasi warga negara modern berlangsung melalui ruang digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kewarganegaraan di era digital.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pendidikan kewarganegaraan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Rahman et al. (2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi siswa dalam kehidupan demokratis. Penelitian Sheik Mohamed dan Hermansyah (2024) menunjukkan bahwa media digital memiliki peran penting dalam mengembangkan civic literacy siswa melalui akses terhadap informasi publik yang lebih luas. Selain itu, Rahmat (2024) menjelaskan bahwa literasi digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan dan kemampuan partisipasi warga negara dalam masyarakat digital. Penelitian Maulana dan Arpanudin (2025) juga menunjukkan bahwa kajian mengenai literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan terus berkembang dan menjadi salah satu fokus utama penelitian pendidikan pada dekade terakhir.

Meskipun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada hubungan antara literasi digital dan kompetensi kewarganegaraan secara umum atau pada pengembangan *digital citizenship*. Penelitian yang secara khusus

mengkaji bagaimana integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berkontribusi terhadap penguatan civic literacy siswa sekolah menengah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti hasil pembelajaran dibandingkan proses pedagogis yang berlangsung di kelas, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana interaksi antara guru, siswa, aktivitas pembelajaran, dan sumber belajar digital membentuk kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam proses penguatan civic literacy melalui integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila pada jenjang sekolah menengah. Padahal, pemahaman terhadap proses pembelajaran sangat penting untuk menghasilkan praktik pedagogis yang efektif dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab di era digital.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai proses penguatan civic literacy siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis literasi digital pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kemampuan siswa dalam memahami informasi digital, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana praktik pembelajaran, interaksi guru dan siswa, serta pemanfaatan sumber belajar digital berkontribusi terhadap pengembangan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* siswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan digital sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi guru dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan civic literacy siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis literasi digital pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Mataram.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena sosial

yang terjadi dalam konteks alami serta memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh subjek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses penguatan *civic literacy* siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis literasi digital pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam konteks nyata di sekolah (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli tahun 2025 di SMA Negeri 1 Mataram yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang memanfaatkan berbagai sumber dan media digital dalam proses pembelajaran. Fokus penelitian diarahkan pada praktik integrasi literasi digital dalam pembelajaran serta kontribusinya terhadap penguatan *civic literacy* siswa.

Subjek penelitian terdiri atas guru Pendidikan Pancasila sebanyak 2 orang dan siswa yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Guru dipilih karena memiliki peran utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, sedangkan siswa dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman belajar dan pemahaman mereka terkait literasi digital dan *civic literacy*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran Pendidikan Pancasila, interaksi antara guru dan siswa, penggunaan media digital, serta aktivitas pembelajaran yang mendukung penguatan *civic literacy*. Observasi dilakukan secara nonpartisipan sehingga peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran (Merriam & Tisdell, 2016).

Wawancara mendalam dilakukan kepada guru dan siswa untuk menggali informasi mengenai implementasi literasi digital dalam pembelajaran, pengalaman belajar siswa, serta persepsi mereka terhadap penguatan *civic literacy*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam sekaligus tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan

pandangannya secara lebih luas (Creswell & Poth, 2018).

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi yang dianalisis meliputi modul ajar, perangkat pembelajaran, bahan ajar digital, lembar kerja peserta didik, foto kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang relevan dengan implementasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara melalui proses triangulasi data (Miles et al., 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang ditemukan selama penelitian.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari guru dan siswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh informan (Lincoln & Guba, 1985). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai implementasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila serta kontribusinya terhadap penguatan *civic literacy* siswa di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila telah dilaksanakan melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi digital, analisis isu-isu aktual, diskusi berbasis kasus,

serta penggunaan media digital sebagai sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran secara konvensional, tetapi juga mengarahkan siswa untuk mencari, membandingkan, dan menganalisis informasi dari berbagai platform digital yang relevan dengan materi yang dipelajari.

Guru Pendidikan Pancasila menjelaskan bahwa penggunaan sumber digital bertujuan untuk membiasakan siswa memperoleh informasi dari berbagai sumber sekaligus melatih kemampuan mereka dalam memverifikasi kebenaran informasi yang ditemukan. Ia mengatakan, “saya tidak ingin siswa hanya menerima informasi dari satu sumber. Mereka harus belajar membandingkan informasi dan melihat apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan literasi digital siswa. Hasil observasi memperlihatkan bahwa siswa diberikan kesempatan untuk mengakses berita daring, konten media sosial, dan berbagai sumber digital lainnya sebagai bahan diskusi mengenai isu-isu kewarganegaraan yang berkembang di masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan konsep literasi digital yang dikemukakan Hobbs (2010), bahwa literasi digital mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi secara kritis. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila memungkinkan peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menilai kualitas informasi yang mereka konsumsi. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan siswa di era digital.

### Penguatan Civic Literacy Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Literasi Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis literasi digital memberikan kontribusi terhadap penguatan *civic literacy* siswa, terutama pada aspek *civic knowledge* dan *civic skills*. Sebagian besar siswa mengaku lebih mudah memahami isu-isu kewarganegaraan ketika materi pembelajaran dikaitkan dengan peristiwa aktual yang mereka temukan melalui media digital. Seorang siswa mengungkapkan, “kalau membahas berita atau kasus yang sedang ramai di

media sosial, kami jadi lebih mudah memahami materi karena bisa melihat langsung contohnya.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan isu aktual sebagai sumber belajar membantu siswa menghubungkan konsep-konsep kewarganegaraan dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui kegiatan diskusi dan analisis informasi digital, siswa belajar mengidentifikasi berbagai sudut pandang, menyampaikan argumentasi, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa siswa mulai menunjukkan kemampuan untuk mempertanyakan kredibilitas sumber informasi dan tidak langsung menerima informasi yang diperoleh dari media sosial. Kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari *civic skills* yang dibutuhkan dalam kehidupan demokratis.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan *civic literacy* lebih dominan terjadi pada aspek pengetahuan dan pemahaman konseptual. Ketika siswa diminta menjelaskan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masih memberikan jawaban normatif dan belum mampu mengaitkannya dengan pengalaman konkret yang mereka alami. Temuan ini menguatkan pendapat Milner (2002) bahwa *civic literacy* tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik kehidupan sosial dan politik. Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Torney-Purta et al. (2001) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan kewarganegaraan tidak selalu diikuti oleh peningkatan partisipasi kewarganegaraan secara nyata. Dengan demikian, integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila telah berkontribusi terhadap penguatan *civic knowledge* dan *civic skills*, tetapi pengembangan *civic dispositions* masih memerlukan penguatan melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Civic Literacy Siswa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan *civic literacy* melalui pembelajaran berbasis literasi digital dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Faktor pertama adalah kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang dialogis dan kontekstual. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang kepada siswa untuk berdiskusi,

mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi berbagai informasi yang diperoleh dari media digital. Faktor kedua adalah ketersediaan sumber belajar digital yang memungkinkan siswa mengakses berbagai informasi secara cepat dan beragam. Keberadaan internet dan perangkat digital memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan buku teks.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan sejumlah faktor penghambat. Salah satunya adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa. Tidak semua siswa memiliki keberanian yang sama dalam menyampaikan pendapat. Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung lebih aktif dalam diskusi dibandingkan siswa yang pemalu atau kurang percaya diri. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran dan belum optimalnya infrastruktur digital juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi digital. Guru mengakui bahwa proses memilih sumber informasi yang relevan dan memandu siswa melakukan analisis kritis membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran konvensional.

Temuan ini sejalan dengan Redecker (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan integrasi literasi digital dalam pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistem sekolah, ketersediaan infrastruktur, serta kesiapan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis literasi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat *civic literacy* siswa. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pedagogis, sosial, dan teknologis yang perlu diperhatikan secara komprehensif dalam pengembangan pembelajaran kewarganegaraan di era digital.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berkontribusi terhadap penguatan *civic literacy* siswa di era digital. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi digital, analisis isu-isu aktual, diskusi berbasis kasus, dan kegiatan evaluasi informasi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan kewarganegaraan. Pembelajaran yang

mengintegrasikan literasi digital memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual sehingga membantu siswa memahami hubungan antara materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sosial yang mereka hadapi, baik di lingkungan nyata maupun ruang digital.

Penguatan *civic literacy* siswa terlihat pada meningkatnya kemampuan dalam memahami isu-isu publik, mengevaluasi kredibilitas informasi, mengidentifikasi bias informasi, serta menyampaikan pendapat dan argumentasi secara lebih kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital berkontribusi terutama pada pengembangan *civic knowledge* dan *civic skills*, sedangkan penguatan *civic dispositions* masih memerlukan upaya yang lebih berkelanjutan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman partisipatif yang memungkinkan siswa mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan penguatan *civic literacy* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang dialogis dan kontekstual, ketersediaan sumber belajar digital, serta lingkungan belajar yang mendukung partisipasi siswa. Sebaliknya, perbedaan karakteristik siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, dan dukungan infrastruktur digital yang belum optimal menjadi tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis literasi digital. Oleh karena itu, guru Pendidikan Pancasila perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sementara sekolah perlu memperkuat dukungan sarana dan prasarana pembelajaran digital. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis literasi digital yang lebih terstruktur dan mengujinya pada berbagai jenjang pendidikan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penguatan *civic literacy* siswa di era digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Mataram yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada guru Pendidikan Pancasila dan seluruh siswa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan tim peneliti atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan selama proses

penelitian hingga penyusunan artikel ini. Dukungan dan partisipasi seluruh pihak sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI

- Anastasya, & Arpanudin, I. (2025). *Digital literacy and civic education in the digital era: A bibliometric analysis (2016–2025)*. *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 10(2), 89–106. <https://doi.org/10.17977/um039v10i22025.p89-106>
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. Aspen Institute.
- Isin, E. F., & Ruppert, E. (2020). *Being digital citizens* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Milner, H. (2002). *Civic literacy: How informed citizens make democracy work*. Tufts University Press.
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Rahman, A., Hamid, S. I., & Nurhadi, M. (2022). Digital citizenship in civic education learning. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 731–752. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>

- Redecker, C. (2020). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.
- Sheik Mohamed, S. H., & Hermansyah, S. (2024). The role of digital media in developing civic literacy among high school students in the era of social transformation. *SMART: Journal of Multidisciplinary Educational Studies*, 2(2), 97–107.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Volcic, Z., & McMahon, M. (2025). No media literacy without civic literacy. *Global Media and Communication*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/17427665251398810>
- Widiatmaka, P., & Kurniawan, I. D. (2023). *Improving civic literacy by utilizing digital literacy through civic education in higher education*. *Jurnal Pekommas*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5126>
- Winataputra, U. S. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif keilmuan dan praktik pendidikan*. Universitas Terbuka.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.